

FGD/Call for papers

Subtema: Eksistensi Organisasi Sayap Partai Politik dalam Sistem Politik di Indonesia

=====

Eksistensi Organisasi Sayap Partai dalam Pergulatan Kekuasaan di Indonesia

Kushandajani*

*Department of Politics and Government Study , Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.

Email: ningkisworo123@gmail.com

Abstrak

Eksistensi organisasi sayap partai bisa dilihat dari peran yang dijalankan. Organisasi sayap dibentuk dan dibangun sebagai kepanjangan tangan parpol agar bisa menyentuh kepentingan masyarakat sesuai dengan segmen pemilihnya. Organisasi sayap juga menjalankan fungsi-fungsi politik sebagaimana partai politik, namun eksistensinya terbungkus dalam eksistensi partai politik. Dengan demikian eksistensi organisasi sayap sangat tergantung dari bagaimana parpol mendesain dan mengelola sumber daya yang ada dalam organisasi sayap guna kepentingan parpol.

Kata kunci: organisasi sayap, partai politik, kekuasaan politik, fungsi politik

Abstract

The existence of the wing political parties can be seen from the role that is carried out. It was formed and built as an extension of political parties to be able to touch the interests of the community in accordance with the voter segment. It was also carry out political functions as political parties, but their existence is encapsulated in the existence of political parties. Thus the existence of wing political parties is very dependent on how political parties design and manage existing resources in wing organizations for the interests of political parties.

Keywords: wing political party, political party, political power, political function.

Pendahuluan

Fungsi-fungsi politik yang disandang dan menjadi tanggungjawab partai politik (parpol) antara lain adalah komunikasi politik, sosialisasi/pendidikan politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik. Dengan fungsi politik yang sedemikian kuat diperankan oleh parpol maka bisa dikatakan jantungnya sistem politik adalah parpol. Artinya, sehat tidaknya sistem politik bisa dilihat dari sehat tidaknya parpol. Untuk menjalankan berbagai fungsi politik yang ada maka dibentuklah organisasi sayap atau ormas parpol. Istilah *underbuow* partai politik yang disandang organisasi sayap partai memberi makna cukup kuat manakala partai politik bertempur memperebutkan kekuasaan politik.

Tiap partai politik (parpol) di Indonesia umumnya memiliki organisasi sayap atau ormas parpol. Seperti Partai Golkar memiliki sepuluh ormas sayap diantaranya Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Satkar Ulama Indonesia, Al-Hidayah, Himpunan Wanita Karya dan Majelis Dakwah Indonesia.

Demikian pula dengan Partai Gerindra, yang saat ini memiliki dua belas organisasi sayap: Gerakan Rakyat Dukung Prabowo (Gardu Prabowo), Tunas Indonesia Raya (TIDAR), Perempuan Indonesia Raya (PIRA), Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA), Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya (SEGARA), Persatuan Tionghoa Indonesia Raya (PETIR), Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), Kesehatan Indonesia Raya (KESIRA), Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara (GEMA SADHANA), Barisan Garuda Muda (BGM), Garuda Muda Indonesia (GMI). Partai Demokrat memiliki delapan organisasi sayap : Angkatan Muda Demokrat Indonesia, Angkatan Muda Demokrat, Generasi Muda Demokrat, Kader Muda Demokrat, Barisan Massa Demokrat, Komite Nasional Pemuda Demokrat, Insan Muda Demokrat Indonesia, Perempuan Demokrat RI. Gerakan Persaudaraan Pemuda (Gema) Keadilan adalah organisasi sayap Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara lain Laskar PKB Diponegoro, Laskar Satrio Piningit, Laskar Surga, Laskar Garda Bangsa, dll. Baitul Muslimin (Bamus) Indonesia, Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI), Taruna Merah Putih, Banteng Muda Indonesia (BMI), Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) adalah organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)

Tiap pemilu perdebatan tentang bagaimana eksistensi organisasi sayap parpol akan muncul, sehingga menghadirkan pertanyaan: bagaimana eksistensi organisasi sayap partai dalam pergulatan kekuasaan di Indonesia ?

Pembahasan

Kekuasaan adalah pendekatan yang sangat kaya makna, dengan konsep yang berlapis-lapis, yang berasal dari tradisi intelektual yang sangat beragam. Konsep atau istilah kekuasaan dan politik berkelindan sedemikian rupa menghasilkan pemaknaan yang baru, dimana saat orang berbicara politik pasti daya abstraksinya sampai ke perebutan kekuasaan, demikian pula sebaiknya. Dengan demikian paradigma politik adalah kekuasaan.

Dengan definisi kekuasaan di atas, lalu bagian dari sistem politik mana yang bergerak masif memperebutkan kekuasaan ? Jawabannya ada di parpol, karena parpol didirikan dengan tujuan akhir mendapatkan penguasaan politik (pemerintahan)... "*Political parties are both vehicles for the pursuit of power and specific sites in which it is produced, organised, fought over, captured and lost.*"¹ Parpol juga memiliki peran paling penting dalam pengembangan demokrasi ... "*it was generally agreed that political parties were "indispensable" for democracy.*"² Meskipun di belahan dunia ada yang membuktikan sebaliknya, dimana perkembangan demokrasi dilakukan tanpa parpol.

¹ Danny Rey, *Political Parties and Power: A New Framework for Analysis*, *SAGE Journal- Political Studies*, 2014, DOI: 10.1111/1467-9248.12143, hlm. 1.

² Gero Erdmann, *Lessons to Be Learned: Political Party Research and Political Party Assistance*, *GIGA Working Paper*, GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of Political Systems, 2010, hlm. 3.

"the Republic of Palau – is offered in order to examine why parties are absent here, and how the Palauan democracy functions without parties. The findings of this case study indicate that both size and culture contribute to the non-existence of parties in Palau, and that the role of parties is in many ways fulfilled by clan structures".³

Dalam konteks demokrasi tersebut di atas, parpol harus memenuhi tugas-tugasnya yang maha penting, antara lain: mempersiapkan kandidat-kandidat terbaiknya di legislatif, mempromosikan program politik dan platform pemilunya, serta bersaing untuk mendapatkan mandat publik dan suara-suaranya. Tetapi di samping itu dalam jangka yang lebih panjang, parpol harus bisa menjadi perantara masyarakat dengan institusi pemerintahan. Oleh sebab itu, parpol harus terorganisir secara demokratis, memiliki akar yang kuat dalam masyarakat sehingga mampu mereka rnenularkan demokrasi kepada masyarakat.⁴

Dalam rangka itulah organisasi sayap dibentuk dan ditumbuhkembangkan oleh parpol sebagai penghubung antara parpol dan semua segmen masyarakat. Organisasi sayap tidak hanya menjadi tumpuan kekuatan bagi partai politik untuk meraup suara dalam pemilu, namun juga melekat fungsi-fungsi politik yang menjadi tugas parpol. Dalam fungsi komunikasi politik dan sosialisasi/pendidikan politik organisasi sayap harus mampu menyampaikan program-program yang dibuat parpol kepada masyarakat sesuai segmen pemilih dimana organisasi sayap didirikan. Misal organisasi sayap petani, maka yang akan digarap adalah komunitas petani, dan seterusnya. Organisasi sayap juga menjadi ajang partisipasi politik bagi para anggotanya. Melalui pembelajaran di organisasi sayap akan ditemukan pengalaman politik bagi anggota, yang akan dijadikan referensi saat anggota berpartisipasi di ranah yang lebih tinggi, yaitu partai politik. Dari sekian banyak fungsi politik, yang paling kuat dilaksanakan adalah fungsi rekrutmen politik dimana fungsi ini dilaksanakan melalui proses pemilu oleh peserta pemilu, yaitu parpol. Dalam fungsi inilah eksistensi organisasi sayap dikembangkan sedemikian

³ Wouter P. Veenendaal, *How Democracy Functions without Parties*, *SAGE Journal-Party Politics*, 2013, DOI: 10.1177/1354068813509524, hlm. 2.

⁴ Meyer, Thomas, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Jakarta, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), hlm. 6.

rupa dengan tujuan utama meraup suara terbanyak agar parpol induknya menjadi penguasa politik.

Di Indonesia, dalam politik lima tahunan, mobilisasi terhadap organisasi sayap selalu dilakukan oleh partai-partai politik manapun. Misal Partai Golkar melalui Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengundang sepuluh organisasi masyarakat sayap partai berlambang beringin ini di kediamannya menjelang Pilpres tahun 2014.⁵ Bahkan untuk Pilpres 2019 juga dilakukan mobilisasi organisasi sayap di Partai Golkar sebagai pendukung calon presiden

“Sejumlah pengurus Golkar Jumat 16 Maret 2018 meluncurkan relawan Golkar Jokowi alias Gojo. Namun tulang punggung dan menjadi mesin relawan, sesungguhnya adalah dua organisasi massa Golkar yaitu AMPI dan AMPG DKI”.⁶

Bahkan terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto, juga tidak terlepas dari dukungan Pimpinan Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbagaguna Gotong Royong (PPK Kosgoro) 1957, sebagai organisasi underbow Partai Golkar.⁷ Dengan demikian organisasi sayap bisa dijadikan indikator bagi prestasi kader saat akan melompat ke jenjang kariernya yang lebih tinggi.

Aktivitas organisasi sayap juga bisa dilihat di tahun 2018, dimana lingkungan DPR menjadi ajang gerilya organisasi sayap pemuda partai politik seperti Forum Pemuda Partai (FPP), Barisan Muda PAN, Pemuda Bulan Bintang, Barisan Muda Damai Sejahtera, Pemuda Demokrasi Kebangsaan, GMPI, serta Taruna Merah Putih dan Gema Keadilan, yang menemui pimpinan DPR dan pimpinan komisi VII. Mereka meminta DPR mengagalkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.⁸

⁵Sindonews.com, <https://nasional.sindonews.com/read/860638/113/ical-kumpulkan-10-ormas-sayap-golkar-di-rumahnya-1399300989> diakses pada tanggal 7 April 2019

⁶TEMPO.CO., <https://nasional.tempo.co/read/1070576/ada-ampi-dan-ampg-di-balik-relawan-golkar-jokowi/full&view=ok> diakses pada tanggal 7 April 2019

⁷TEMPO.CO., <https://nasional.tempo.co/read/1042446/perjalanan-airlangga-hartarto-menuju-ketua-umum-partai-golkar/full&view=ok> diakses pada tanggal 7 April 2019.

⁸*detik news*. Kamis 15 Mei 2008, 17:10 WIB <https://news.detik.com/berita/d-940255/underbow-partai-gerilya-di-dpr-tolak-kenaikan-bbm> diakses 14 April 2019.

Partai Gerindra juga membangun TIDAR sebagai perluasan basis massa Partai Gerindra, dimana di Provinsi Jawa Tengah TIDAR melalui program dan kegiatan yang dibuat. Meski mendapat dukungan kuat dari partai, namun tetaplah menghadapi hambatan seperti kecilnya dukungan dana dari Partai Gerindra untuk setiap kegiatan TIDAR, ada beberapa kali konflik kecil dengan organisasi sayap lain di Partai Gerindra, dan masalah koordinasi intern.⁹

Namun demikian belum ada studi yang bisa membuktikan bahwa banyak tidaknya atau kuat tidaknya organisasi sayap parpol akan berpengaruh terhadap besar kecilnya perolehan suara saat pemilu. Masih harus dilihat faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi sayap. Berikut hasil perolehan suara setiap partai pada pemilu 2014 lalu, diurutkan yang paling besar ke yang kecil.

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen)
 - Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen)
 - Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen)
 - Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen)
 - Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04 persen)
 - Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen)
 - Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen)
 - Partai Nasdem 8.402.812 (6,72 persen)
 - Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 persen)
 - Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen)
 - Partai Bulan Bintang 1.825.750 (1,46 persen)*
 - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.143.094 (0,91 persen)*
- * PBB dan PKPI tidak lolos ke DPR karena perolehan suara kurang dari 3,50 persen.

Sumber: KPU, 2014

Angka-angka di atas tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah hasil kerja organisasi sayap. Bahkan jikapun itu merupakan peran organisasi sayap, lalu organisasi sayap yang mana ? Klaim sepihak dari organisasi sayap tertentu terhadap perolehan suara bisa memicu konflik dengan organisasi sayap lainnya dalam satu partai.

Bahkan dari hasil pengamatan Iberamsjah kinerja organisasi sayap partai politik sejauh ini dinilai relatif tumpul dan sekadar menjadi pajangan tanpa peta

⁹Dzihnaton Nabilah, Peran Organisasi Sayap Tidar (Tunas Indonesia Raya) Dalam Perluasan Basis Massa Partai Gerindra Di Jawa Tengah, *Skripsi*, Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm. 107.

kerja yang jelas. Tujuan parpol membentuk underbow juga bukan untuk meningkatkan kualitas kinerja, melainkan untuk kepentingan politis.

"Underbow partai itu hanya untuk memberi wadah jabatan saja bagi pengurus partai sehingga orangnya ya itu-itu juga. Kinerja underbow hampir tidak ada yang menyentuh rakyat. Hanya cari program yang pragmatis untuk dapat jabatan dan kekayaan.Jika saja underbow partai mampu bekerja dengan baik, dapat dipastikan citra parpol di masyarakat tak seburuk saat ini. Sejauh ini banyak underbow yang dibangun parpol justru berjalan bersamaan dengan penurunan kinerja parpol. Masyarakat pun tak percaya pada parpol maupun underbow yang dijadikan alat parpol".¹⁰

Partai Hanurabahkan melakukan evaluasi terhadap organisasi sayapnya, dari tujuh yang telah eksis kemungkinan akan dipangkas menjadi tiga. Hal tersebut sebagai persiapan partai besutan Wiranto itu dalam menghadapi verifikasi faktual sebagai kontestan pemilu 2019.¹¹ Sebagai informasi Partai Hanura memiliki tujuh organisasi sayap dan otonom partai.: (Gema) Hanura, Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura), Srikandi Hanura, Perempuan Hanura, Buruh Hanura, Satria Hanura, Lembaga Komitmen Tim Rakyat (LKTR) dan Ostra

Kajian Pakpahan di beberapa negara terkait kekuatan buruh dan relasinya dengan parpol menghasilkan tiga model relasi buruh dan politik pada pengalaman internasional yakni :¹²

1. Serikat buruh underbow partai politik. Ini berlangsung di Negara-negara otoriter seperti komunis dan Indonesia masa Orde baru,
2. Serikat buruh menguasai/memiliki sebuah partai politik sebagaimana Negara-negara welfarestate seperti Brazilia, Jerman, Selandia Baru, Inggris dll. Dan
3. Serikat buruh bersimbiose-mutualis dengan sebuah partai politik, seperti pengalaman AFL-CIO (American Federation of Labour and Confederation Industries Organization) dengan partai Demokrat di Amerika Serikat.

¹⁰ Iberamsjah, Underbow partai masih tumpul , *Sindonews.com*, Selasa 28 Februari 2012 08:06 WIB, <https://news.okezone.com/read/2012/02/28/435/583640/underbow-partai-masih-tumpul> diakses tgl 10 april 2019.

¹¹ Syahrir Lantoni , Hanura Pangkas 7 Sayap Partai Jadi 3, *INDOPOS.CO.ID*, Selasa, 28 Maret 2017, <https://indopos.co.id/read/2017/03/28/92856/hanura-pangkas-7-sayap-partai-jadi-3>.

¹² Muchtar Pakpahan , Buruh dan Politik Belajar dari Pengalaman Internasional

The Presidet Post Indonesia. 17 September 2012. <http://old.presidentpost.id/2012/09/17/buruh-dan-politik-belajar-dari-pengalaman-internasional/> diakses tanggal 10 April 2019

Di tipe nomor 3 memperlihatkan sangat kuatnya independensi Serikat Buruh, karena Serikat Buruh menentukan kebijakan Partai Politik, bukan Partai politik yang menentukan Serikat Buruh.

Bisakah organisasi sayap parpol bisa mandiri kuat sebagaimana yang oleh Pakpahan diperlihatkan dalam model nomor 3 ? di Indonesia, kemungkinan ini sangat kecil mengingat organisasi sayap memang lahir dari parpol. Berbeda dengan serikat buruh yang memang lahir dari komunitas buruh yang sangat kuat, sehingga posisi tawar organisasi buruh lebih seimbang manakala berhadapan dengan parpol. Demikian pula yang terjadi pada organisasi massa, kelompok kepentingan, asosiasi profesi, dan lainnya, yang lahir dari masyarakat, tidak bisa begitu saja digiring dan beralih posisi sebagai organisasi sayap parpol, karena masing-masing terikat pada komitmen kelembagaannya. Seperti peristiwa di Garut misalnya, dimana terjadi aksi penolakan GMNI terhadap kehadiran Presiden Joko Widodo, yang bisa diterjemahkan sebagai bukti sikap mandiri GMNI yang independen, kritis, mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. GMNI secara normatif sebagaimana tertuang dalam AD/ART GMNI, adalah organisasi kader dan organisasi perjuangan yang bersifat independen serta mandiri dan tidak/bukan merupakan afiliasi atau underbow dari partai politik manapun.¹³ Sikap berbeda diambil oleh KAMMI, meski relasinya tak formal, dalam realitasnya ikatan antara PKS dan KAMMI amat kuat. Bahkan KAMMI kerap dianggap sebagai sayap mahasiswa PKS, karena banyak aktivis KAMMI merintis karier politiknya di PKS. Hal ini terjadi karena sejumlah tokoh KAMMI berkontribusi penting dalam pembentukan PKS (sebelumnya bernama Partai Keadilan/PK). Organisasi KAMMI tetap berdiri terpisah, tanpa hubungan formal dengan partai. PKS dan KAMMI hanya mengakui mempunyai hubungan ideologi, budaya, dan sosial.¹⁴

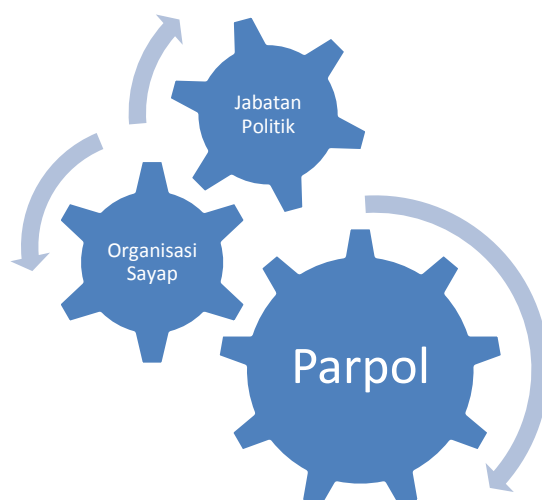
. Secara kelembagaan partai politik di Indonesia hingga kini masih menunjukkan kelemahan tingkat pelebagaan. Pada umumnya mereka belum

¹³ *Koran SINAR PAGI*, Kab.Garut, GMNI Tidak Berafiliasi, dan Bukan Underbow dari Partai Politik Manapun, 20 Januari 2019, <https://www.koransinarpagijuara.com/2019/01/20/gmni-tidak-berafiliasi-dan-bukan-underbow-dari-partai-politik-manapun/> diakses tanggal 14 April 2019.

¹⁴ *Tempo.co.*, KAMMI, Sayap Kampus Tak Resmi PKS, Sabtu, 9 Februari 2013 07:30 WIB <https://nasional.tempo.co/read/460215/kammi-sayap-kampus-tak-resmi-pks/full&view=ok> diakses tanggal 14 April 2019.

berhasil menjalankan fungsi-fungsinya. Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa jantungnya sistem politik adalah parpol, karena fungsi-fungsi esensial yang melekat para parpol diantaranya adalah sosialisasi (pendidikan) politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik. Di dalam fungsi rekrutmen politiklah peran parpol sangat dominan, dimana semua jabatan politik (dan pemerintahan) berasal dari parpol yang memenangkan suara di pemilu.¹⁵ Fungsi utama parpol Pilipina“ remain shackled by the dictates of a few powerful individuals and subject to political exigencies.”¹⁶ Saat para kader parpol terpilih, mereka menjalankan banyak peran di jabatan-jabatan politik dan pemerintahan....“*In Malaysia, elected representatives have important roles in party to affiliate party apparatus, carry out election campaigns, and try to convince voting citizen by casting their ballot for them*”.¹⁷

Dengan uraian yang ada eksistensi organisasi sayap dapat digambarkan sebagaimana berikut.



Cara kerjanya: Mesin parpol bergerak mendesain, mengelola, dan mengembangkan organisasi sayap. Parpol bersama-sama organisasi sayap bergerak ke masyarakat

¹⁵ Abd. Rahman Mawaz, Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia, *IN RIGHT, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 6, No. 2, Mei 2017, hlm. 137.

¹⁶ Weissenbach, Kristina, *Political Parties and Party Types - Conceptual Approaches to the Institutionalization of Political Parties in Transitional States: The Case of the Philippines*, Manila, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2010, hlm. 1.

¹⁷ Malike Brahim, The Roles of Elected Representatives in Political Parties: What's the Challenges?, *Asian Social Science*; Vol. 13, No. 6, 2017, hlm. 55.

agar memberikan dukungan dan suara ke parpol. Saat parpol meraih suara tertentu, maka kader partai bisa meraih kuasa di politik dan pemerintahan. Kinerja kader di posisi politik dan pemerintahan merupakan iklan terbaik bagi parpol. Jika mereka berkinerja dan mampu membangun kepercayaan publik, maka parpol dan organisasi sayap tidak perlu bekerja keras untuk meraih kemenangan kembali di pemilu selanjutnya.

Penutup

Dari uraian di atas dapat dijelaskan simpulan dari eksistensi organisasi sayap parpol. **Pertama**, organisasi sayap dibentuk dan dibangun sebagai kepanjangan tangan parpol agar bisa menyentuh kepentingan masyarakat sesuai dengan segmen pemilihnya. **Kedua**, organisasi sayap sering dijadikan batu pijakan bagi kader partai manakala akan meniti karier politik lebih tinggi. **Ketiga**, organisasi sayap melaksanakan fungsi sebagaimana partai politik, karena menjadi bagian tidak terpisahkan dari parpol. **Keempat**, oleh karena organisasi sayap memang dibuat oleh parpol maka relasi antara parpol dan organisasi sayap seperti induk dan anak. **Kelima**, dengan demikian eksistensi organisasi sayap sangat tergantung dari bagaimana parpol mendesain dan mengelola sumber daya yang ada agar berkelindan dengan tujuan parpol induknya.

Melalui penguatan organisasi sayap akan dengan sendirinya memperkuat parpol sebagai unsur dominan dalam sistem politik. Idealnya keberadaan parpol akan lebih kuat jika diikuti dengan pembentukan organisasi sayap. Parpol jika dianalogikan sebagai burung yang mempunyai "sayap", maka istilah "sayap" menunjukkan bahwa parpol sebagai tubuh utama atau induk berupaya untuk membentangkan "sayap" agar bisa terbang lebih tinggi. Namun sekuat apapun "sayap" hanya akan tumbuh dari tubuh yang kuat.

Daftar Pustaka

Brahim, Malike, The Roles of Elected Representatives in Political Parties: What's the Challenges?, *Asian Social Science*; Vol. 13, No. 6, 2017

detik news. Kamis 15 Mei 2008, 17:10 WIB <https://news.detik.com/berita/d-940255/underbow-partai-gerilya-di-dpr-tolak-kenaikan-bbm> diakses 14 April 2019

Erdmann, Gero, Lessons to Be Learned: Political Party Research and Political Party Assistance, *GIGA Working Paper*, GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of Political Systems, 2010.

Iberamsjah, Underbow partai masih tumpul , *Sindonews.com*, Selasa 28 Februari 2012 08:06 WIB, <https://news.okezone.com/read/2012/02/28/435/583640/underbow-partai-masih-tumpul> diakses tgl 10 April 2019

Jafar AW, Muhammad, Peranan Partai Politik dalam Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Kadenda, Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, Volume 10, No. 6, 2017.

Mawaz, Abd. Rahman, Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia, *IN RIGHT, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 6, No. 2, 2017.

Nabilah, Dzihnatur, Peran Organisasi Sayap Tidar (Tunas Indonesia Raya) Dalam Perluasan Basis Massa Partai Gerindra Di Jawa Tengah, *Skripsi*, Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2015.

Pakpahan , Muchtar, Buruh dan Politik Belajar dari Pengalaman Internasional, *The President Post Indonesia*. 17 September 2012.
<http://old.presidentpost.id/2012/09/17/buruh-dan-politik-belajar-dari-pengalaman-internasional/> diakses tanggal 10 April 2019

Rye, Danny, Political Parties and Power: A New Framework for Analysis, *Sage Journal- Political Studies*, 2014, DOI: 10.1111/1467-9248.12143.

Rosana, Ellya, Partai Politik dan Pembangunan Politik, *Jurnal TAPIS*, Vol.8, No.1, 2012.

Rico Afrido Simanjuntak, Ical kumpulkan 10 ormas sayap Golkar di rumahnya, *Sindonews.com*, Senin, 5 Mei 2014 - 21:43 WIB
<https://nasional.sindonews.com/read/860638/113/ical-kumpulkan-10-ormas-sayap-golkar-di-rumahnya-1399300989> diakses pada tanggal 7 April 2019

Caesar Akbar, Ada AMPI dan AMPG di Balik Relawan Golkar Jokowi, *TEMPO.CO*, Sabtu, 17 Maret 2018 13:36 WIB, <https://nasional.tempo.co/read/1070576/ada-ampi-dan-ampg-di-balik-relawan-golkar-jokowi/full&view=okdiakses> pada tanggal 7 April 2019

Dias Prasongko, Perjalanan Airlangga Hartarto Menuju Ketua Umum Partai Golkar, *TEMPO.CO*.Jumat, 15 Desember 2017 07:47, WIB, <https://nasional.tempo.co/read/1042446/perjalanan-airlangga-hartarto-menuju-ketua-umum-partai-golkar/full&view=okdiakses> pada tanggal 7 April 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Veenendaal, Wouter P. , How Democracy Functions without Parties, *SAGE Journal-Party Politics*, 2013, DOI: 10.1177/1354068813509524.

Biografi Singkat

Tempat/Tgl. Lahir : Purwokerto/14 Juni 1962
Status Perkawinan : Menikah
Pekerjaan : Dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP
Pendidikan : S3 – Doktor Ilmu Hukum UNDIP
S2 – Magister Ilmu Politik UI
S1 – Sarjana Ilmu Pemerintahan UNDIP
Publikasi (2014-2018)

1. Buku. **Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Dalam Perepektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.** Semarang:Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP Undip. Cet-1, September 2018, ISBN:978-602-52954-0-9. ix + 116 hlm.
https://play.google.com/store/books/details/Kushandajani_Kewenangan_Desa_dan_Penyelenggaraan_P?id=dHx1DwAAQBAJ
2. Jurnal. **Bekerjanya Hukum Tentang Desa Di Ranah Pemberdayaan Politik, Sosial, dan Ekonomi Perempuan Desa.** *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 47. NO. 4. 2018. ISSN: 2986-2695. Hlm. 413-429. **Terakreditasi Peringkat 2, Nomor 30/E/KPT/2018**
DOI: [10.14710/mmh.47.4.2018.413-429](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20374)
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20374>
3. Jurnal. **Border Conflict Resolution Strategies between Republic of Indonesia and Republic of Timor Leste in Manusasi Sector.** *International Journal of Research in Social Science*, Vol.8, Issue 2, February

2018. ISSN: 2249-2496. Impact Factor (IJRSS) 6.278 for 2015 and 7.081 for 2016.
<https://www.ijmra.us/project%20doc/.../IJMRA-13350.pdf>
4. Working Papers. **Gender and Village Government Transformation on Indonesia, An Initial Assesment.** *International Indonesia Forum 2017 Working Paper Series*, Vol. 2.
 - <http://iif.or.id/2017-iif-working-papr-series/>
 - <https://iif.or.id/wp-content/uploads/2017/10/02-Alfirdaus-Laila-Kholid-Gender-and-Village-Governance-Transformation.pdf>
 5. Proceedings of the International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016). **Managing Village Governance Based on Mutual Assistance (Gotong Royong).** *Atlantis Press*. Series: Advances in Social Science, Education, and Humanities Research, Vol. 84. 2017.
 DOI: <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.51>
<https://www.atlantis-press.com/proceedings/iconeg-16/25874248>
 6. Jurnal. **Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.** *JIIP, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.2, NO. 1, Maret 2016. ISSN: 2548-4931.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/1635/1083>
 7. Proceedings of the International Conference on Social Politics (ICSP 2016). **Village Authority Based On Indigenous Right and Local Scale Authority: Implications of Law No. 6/2014 Towards Village Authority.** ISBN: 978-602-73900-1-0, hlm. 111-120.
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2869/Proceeding%20ICSP%202016%20UMY.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
 8. Jurnal. **Implikasi UU No. 6 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa.** *Yustisia*, Edisi 92 (Mei-Agustus 2015), Tahun 2015, hlm. 76-94. ISSN: 0852-0941. Terakreditasi B No. 56/DIKTI/Kep/2012, 24 Juli 2012.
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8656/7744>
 9. Jurnal. **Inovasi Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan.** *JIIP, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2015. hlm. 45-54. ISSN: 2460-142X.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/791/572>
 10. Jurnal. **Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang.** *POLITIKA*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015.hlm. 63-73. ISSN: 2086-7344.
 DOI: <https://doi.org/10.14710/politika.6.2.2015.63-73>
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/10711/8499>

11. Jurnal. **Pengelolaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi, Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Sragen**". *POLITIKA*, Jurnal Ilmu Politik, Magister Ilmu Politik Undip, Vol. 5, No. 1, April 2014. ISSN: 2086-7344.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/8218/6739>